

Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang

Medy Ardani*

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received:

18 August 2020

Received in revised form:

5 September 2020

Accepted:

18 December 2020

Keyword:

Institute for Community Empowerment

Kata Kunci:

Lembaga Pemberdayaan masyarakat

ABSTRACT

Study on Implementation of the Institute for Community Empowerment in Sungai Keledang District of Samarinda Seberang, shows execution of tasks that are still not good enough and optimal. This is shown by the statements of the parties concerned. Institute for Community Empowerment as a forum for community participation in planning and the construction has been successfully carry out their duties properly and the urban village in accommodating their aspirations and run the existing development and need to be on guard and improved continuously so intertwined favorable climate in the region Sungai Keledang

ABSTRAK

Studi tentang Pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang, Menunjukkan Pelaksanaan Tugas yang masih belum cukup baik dan optimal. Hal ini di tunjukan dengan adanya pernyataan dari pihak yang terkait. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melakukan pembangunan telah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan juga pihak kelurahan dalam menampung aspirasi mereka serta menjalankan pembangunan yang ada dan perlu di jaga dan di tingkatkan terus menerus sehingga terjalin iklim yang kondusif di wilayah Kelurahan Sungai Keledang.

* Corresponding author: Medyardani@gmail.com

Pendahuluan

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara terus menerus, bertahap dan berkesinambungan dalam mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang sebagaimana telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke IV bahwa tujuan pembangunan adalah untuk memajukan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan di Indonesia khususnya Kalimantan Timur pada dasarnya di peruntukan bagi masyarakat Kalimantan Timur yang pembangunannya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka manusia sebagai unsur terpenting dalam pembangunan dituntut untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam pembangunan. Dengan demikian manusia sebagai unsur terpenting dalam pembangunan harus dapat menentukan arah dan tujuan yang akan dicapai.

Melihat dari pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata serta materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merdeka bersatu berdaulat dalam suasana kehidupan yang aman, tenteram dan damai. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut maka perlu diwujudkan pemerintahan yang baik pemerintahan yang memiliki sumber daya manusia atau aparatur yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Negara pembangunan. Dengan adanya pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, khususnya di Kalimantan Timur, maka Pemerintahan di daerah Kalimantan Timur memiliki Peranan strategis dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan tuntutan zaman terutama untuk menjawab tantangan masa depan di Kalimantan Timur.

Kerangka Dasar Teori

Manajemen

Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan yang dilakukan oleh orang maupun kelompok yang telah diberikan amanah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Siagian (2008:1), Manajemen berasal dari kata kerja *to manage* (bahasa Inggris), yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan berasal dari kata *Daya*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Daya* artinya kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak.

Pemberdayaan pada hakikatnya adalah suatu proses untuk membuat seseorang dapat melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya.

Sumaryadi (2005:99) yang memberikan batasan "pemberdayaan sebagai proses akibat dari mana individu memiliki otonomi motivasi dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan mereka dalam suatu cara yang memberikan rasa kepemilikan dan kepuasan bilamana mencapai tujuan-tujuan bersama organisasi.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan di bentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai mitra kerja pemerintah dalam ikut serta menyukseskan pembangunan di segala bidang, dan LPM ini di bentuk oleh Pemerintah Kota dalam penunjukan pengurus LPM atas dasar hasil pemilihan warga dan tokoh masyarakat/tokoh agama setempat, serta masa bakti kepengurusan LPM di tetapkan 5 (Lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. dan Tujuan otonomi daerah adalah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintah daerah. Tujuan ini mengandung makna adanya perubahan kepada kehidupan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat, dalam upaya mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Selain itu juga adanya keinginan untuk mewujudkan terciptanya masyarakat madani (*civil society*) dalam kehidupan berpemerintah, bermasyarakat dan bernegara yang memiliki nilai-nilai *Good Governance* yang memunculkan diri demokrasi dan sikap keterbukaan, kejujuran, keadilan, berorientasi pada kepentingan rakyat, serta bertanggung jawab kepada rakyat.

Salah satu dampak yang timbul adalah terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintah yang bercorak sentralistik dengan memberikan keleluasaan otonomi daerah. Pemerintah pusat tidak dapat merumuskan semua kebijakan yang bergubungan dengan kepentingan daerah. Pemerintah, pada hakekatnya berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat (*public service*). Pemerintah tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Dengan demikian, hakekat otonomi adalah meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh dan berkembang dari rakyat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh rakyat, dan hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat. Seiring dengan hakikat otonomi daerah, maka dalam program pembangunan, masyarakat tidak lagi di aggap sebagai obyek dari pembangunan. Hal ini menyiratkan adanya perubahan paradigma dan pembangunan itu sendiri. Paradigma pembangunan berkeadilan yang berpusat pada rakyat. Dalam paradigma ini, peran individu bukan sebagai obyek melainkan sebagai pelaku yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan menggerakkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan yang berpusat pada rakyat menghargai dan mempertimbangkan peran serta aktif masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan di bidang pembangunan masyarakat, sesuai dengan isi perda Kota Samarinda No 11 tahun 2004 tentang pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Sehingga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat disini terdiri dari Tokoh-tokoh

Masyarakat yang dijadikan panutan atau sebagai contoh tauladan yang baik kepada masyarakatnya, seperti tokoh agama, tokoh organisasi kemasyarakatan dan lain-lain.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan di kelurahan yang merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri, serta merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terdapat kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menjadi tempat bagi masyarakat untuk memberikan pendapatnya mengenai kemajuan daerahnya dalam bidang pembangunan.

Menurut Peraturan Daerah kota Samarinda No 11 Tahun 2004 Kota Samarinda, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melakukan pembangunan.
2. Menumbuhkembangkan jiwa dan semangat serta memberdayakan masyarakat dalam membangun secara berswadaya dan bergotong royong.
3. Menampung dan mengolah semua aspirasi dan partisipasi masyarakat dibidang pembangunan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang bersumber dari swadaya masyarakat.
4. Sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah dan Masyarakat serta warga masyarakat itu sendiri
5. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Masyarakat, membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan.
6. Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera.

Defenisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah suatu definisi yang dipergunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok/individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial yang tidak dapat ditangkap oleh manusia.

Dan yang di maksud Definisi Konsepsional dalam skripsi ini adalah Tugas Lembaga Kemasyarakatan yang terdapat pada Peraturan Daerah No 11 Tahun 2004.

Wilayah Penelitian

Sebagai lokasi atau wilayah dari penelitian skripsi ini adalah Kantor Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jl.Dato Iba Rt.05 Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda. Dipilihnya Kantor Lembaga Pemberdayaan Masyarakat karena sebagai salah satu sarana dalam melakukan kegiatan tugas – tugas dan program – program pembangunan pemerintah.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Keperpustakaan, dalam hal ini penulis menggunakan perpustakaan sebagai tempat untuk mempelajari dan mengumpulkan data dari literature-literatur, buku-buku ilmiah, laporan-laporan dan lain-lain yang menunjang penelitian skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan, sebuah teknik pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan atau penelitian langsung ke lapangan atau lokasi penelitian.

Teknik pengumpulan data adalah :

- a. Observasi Langsung, yaitu penulis secara langsung mengadakan penelitian ke objek penelitian.
- b. Analisis dokumen, yaitu pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa surat-surat, arsip-arsip, dan dokumen-dokumen yang ada hubungan dengan kebutuhan data yang digunakan dalam proses penulisan.
- c. Wawancara Secara Mendalam, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada sumber-sumber yang kompeten dan dapat memberikan keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Gejala yang dihadapi

Pada umumnya setiap penelitian yang dilakukan menemukan dua gejala, nominal dan gejala kontinum. Gejala nominal bersifat kuantitatif dimana orang dapat membaca banyaknya subjek dari setiap kategori gejala, sedangkan gejala kontinum memperlihatkan sifat kualitatif yang menunjukkan variasi tingkat subyek. Berdasarkan pendapat diatas, maka dalam penulisan skripsi ini menemukan dua gejala, yaitu gejala nominal dan gejala kontinum.

Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Deskriptif menurut Maleong (2002:6) adalah "Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka". Dari pendapat ini dijelaskan penelitian deskriptif dalam penyajian data itu lebih kepada kata-kata, kalimat atau gambar, juga dapat berupa naskah wawancara, catatan lapangan, video tape, dokumen pribadi, dokumen resmi atau memo.

Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer : data yang diperoleh melalui responden dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti, misalnya kepada Key Informan dan Informan.
2. Data Sekunder : data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi, antara lain melalui:
 - a. Dokumen-dokumen dan laporan hasil evaluasi
 - b. Buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan media massa yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk analisis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang telah diperoleh yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya. Kemudian pemakaian alat analisis

tersebut sesuai dengan tahapan yang dikembangkan Miles dan Huberman (2009:20) seperti yang tergambar sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan Data merupakan data pertama dan data mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian dengan berbagai macam cara, seperti: observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya.

2. Reduksi data

Adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan dan membuat abstraksi, mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian kedalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempertajam atau memusatkan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan.

3. Penyajian data

Adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga diperlukan penarikan kesimpulan atau mengambil tindakan. Pengambilan tindakan ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Adalah merupakan langkah terakhir meliputi makna yang telah disederhanakan, disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksikan hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.

Pembahasan

Sebagai Wadah Partisipasi Masyarakat Dalam merencanakan Dan melakukan Pembangunan

Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melakukan pembangunan adalah dimana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat melakukan, dan menggerakkan, atau membuat kegiatan yang didalam kegiatannya itu dapat melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan mengenai pembangunan yang ada di Kelurahan. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Keledang sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melakukan pembangunan di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 tahun 2004, dilakukan dengan cara meningkatkan swadaya dan gotong royong dan pertemuan warga baik secara berkala maupun insidental.

Dengan adanya kegiatan gotong royong yang dilakukan setiap satu minggu sekali, tepatnya pada setiap hari jum'at diberbagai tempat yang berbeda, seperti di jum'at pertama gotong royong diadakan di RT 01, selanjutnya di minggu depan berlanjut ke RT 02, dan kegiatan ini berlanjut di setiap minggunya di tempat yang berbeda, adapun konsumsi yang telah di sediakan di koordinir oleh LPM. Dan juga kegiatan gotong royong ini di harapkan

dapat meningkatkan kerukunan antar warga masyarakat Sungai Keledang, sehingga dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, sesuai dengan Tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Menumbuh Kembangkan Jiwa dan Semangat Serta Memberdayakan Masyarakat Dalam Membangun Secara Berswadaya dan Bergotong Royong

Menumbuh kembangkan jiwa dan semangat serta memberdayakan masyarakat dalam membangun secara berswadaya dan bergotong royong yaitu LPM bersama dengan Kelurahan bekerja sama dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada serta melaksanakan perencanaan yang sudah disepakati bersama. Sehingga nantinya perencanaan pembangunan yang bersumber dari partisipasi masyarakat dapat dicapai sesuai dengan target yang diinginkan.

Dengan adanya koordinasi yang baik antara LPM dengan Kelurahan, maka perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan pelaksanaannya juga dapat terealisasi dengan baik pula. Sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Hanya saja banyak masyarakat yang masih kurang kesadaran dalam hal kebersihan, seperti membuang sampah sembarangan yang membuat parit/selokan menjadi penuh dengan sampah yang dapat menyebabkan banjir. Untuk itu LPM dan pihak Kelurahan perlu memberikan pengarahannya berupa bahwasanya membuang sampah itu dapat merugikan diri kita sendiri serta dapat pula merugikan orang lain, dan juga LPM membuat plang-plang yang berisikan kata-kata yang mengingatkan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Serta pihak LPM mengingatkan kepada masyarakat agar dapat menjaga kebersihan dan merawat fasilitas, sarana prasarana yang ada di Kelurahan.

Menampung dan Mengolah Semua Aspirasi dan Partisipasi masyarakat dibidang Pembangunan, Melaksanakan dan mengendalikan Pembangunan Yang Bersumber Dari Swadaya Masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mengatur dan bekerjasama dengan Pemerintah Kelurahan dalam menetapkan suatu tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan pembangunan yang akan dilakukan, yaitu dengan mengkaji masalah yang akan dihadapi. Seperti persoalan banjir yang mana ada masyarakat RT setempat yang mengeluhkan di tempatnya tersebut sering mengalami banjir, ketika musim hujan datang. Setelah mendapatkan laporan dari warga setempat LPM membuat tabulasi Data Persoalan, sehingga nantinya dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan apa saja yang harus diselesaikan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Berikut adalah Tabulasi dan Persoalan yang ada.

Sebagai Sarana komunikasi Antara Pemerintah dan Masyarakat Serta Warga Masyarakat Itu Sendiri

Sebagai Sarana Komunikasi Antara Pemerintah Dan Masyarakat Serta warga masyarakat itu sendiri adalah LPM melakukan kegiatan, saling memberi informasi dan mengatur hal-hal yang disepakati bersama dengan Lembaga/Organisasi yang ada di Kelurahan. Dalam mengkoordinasikan Lembaga/Organisasi yang ada di Kelurahan LPM melakukan rapat koordinasi dengan pemerintahan Kelurahan Sungai Keledang dan Lembaga-lembaga yang ada di Kelurahan. Tidak hanya itu, LPM juga melakukan pengembangan hubungan kerja dengan Lembaga keagamaan dan sosial budaya. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah seperti dari kepolisian mengadakan

program kegiatan anti narkoba, agar generasi muda tidak terpengaruh kedalam hal-hal yang berhubungan dengan barang haram tersebut. maka pihak LPM berkoordinasi dengan pihak kelurahan untuk mengumpulkan perwakilan di setiap RT, yang nantinya mereka akan menyampaikan kepada warganya bahwa ada program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dari pihak kepolisian untuk mensosialisasikan program tersebut

Meningkatkan Pengetahuan dan keterampilan Masyarakat, Membina dan Menggerakkan Potensi Pemuda Untuk Pembangunan.

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan adalah dimana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang didalam kegiatannya masyarakat di Kelurahan Sungai Keledang digerakkan, dimotivasi agar meningkatkan taraf hidupnya, maka dibuatlah Program Penanggulangan Kemiskinan untuk membantu masyarakat mengembangkan kemampuannya dalam meningkatkan kualitas dan taraf hidupnya. Seperti LPM, sebelum mengadakan pelatihan mereka mensurvei kebutuhan pelatihan apa yang mereka butuhkan di tempat tersebut, seperti halnya banyak pemuda-pemuda yang menyukai otomotif namun belum bisa mengembangkan keahliannya tersebut, maka pihak LPM mengadakan pelatihan yang berhubungan dengan bidang otomotif yang berupa pelatihan perbengkelan. Namun tidak hanya pelatihan perbengkelan saja yang dilaksanakan oleh pihak LPM.

Meningkatkan Peranan Wanita Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera

Keberhasilan suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh wanita Perempuan mempunyai andil besar dalam membentuk sebuah keluarga yang bermartabat. Lebih dari itu, perempuan juga mempunyai andil besar dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan kelompok. Salah satu buktinya, bahwa perempuan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya dengan melakukan kegiatan usaha produktif rumah tangga.

Salah satu wadah organisasi perempuan dimasyarakat Desa dan Kelurahan adalah PKK. PKK merupakan sebuah gerakan yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak dan dinamisatornya dalam membangun, membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat.

Disini LPM saling bersinergi dengan PKK demi wujudkan masyarakat yang sejahtera, untuk itu LPM sangat dibutuhkan sebagai penopang organisasi PKK didalam memenuhi kebutuhan mereka guna memberdayakan masyarakat khususnya bagi perempuan agar mereka dapat membantu suami di dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan mereka serta membina anak-anak mereka untuk menjadi generasi yang berguna bagi bangsa dan negara.

Penutup

Kesimpulan

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga Yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat di Kelurahan, merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah khususnya di Kelurahan Sungai Keledang dalam menampung dan mewujudkan segala bentuk aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
2. Di dalam penelitian di dapatkan bahwa masih adanya kekurangan yang di lakukan oleh LPM yaitu bahwa LPM masih kurang melakukan sosialisasi program program mereka yang dinyatakan dari hasil wawancara kepada masyarakat yang menyatakan bahwa LPM masih kurang melakukannya sehingga masih terdapat masyarakat yang belum tahu program program yang dilakukan LPM.
3. Dengan sosialisasi yang baik yang di lakukan oleh LPM maka masyarakat akan lebih mengetahui program program yang akan di lakukan oleh LPM. Sehingga tidak ada warga yang mengeluhkan lagi akan kurangnya sosialisasi yang di lakukan oleh LPM.
4. Berdasarkan hasil Penelitian / wawancara yang penulis dapat Peran LPM di Kelurahan Sungai Keledang sudah baik dalam menjalankan tugasnya untuk memajukan daerahnya sesuai dengan data – data yang telah didapat penulis dan juga koordinasi antara kelurahan dan LPM sangat membantu masyarakat dalam menjalankan program – program pemerintah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang. Penulis menyampaikan saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pihak terkait dan pihak – pihak yang ingin mengembangkan penelitian sejenis. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Didalam menumbuhkembangkan jiwa semangat didalam memberdayakan masyarakat LPM harus saling berkomunikasi mendengar permasalahan permasalahan yang terjadi dimasyarakat dan membantu didalam penyelesaian permasalahan tersebut sehingga jiwa dan semangat yang ada terus terjalin.
2. Pihak LPM harus dapat memberikan sosialisasi-sosialisasi terhadap setiap pembangunan yang ada serta didalam memberdayakan masyarakat harus ada kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh pihak pihak yang terkait didalam pelaksanaan pembangunan tersebut dan saling mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui pembangunan-pembangunan yang ada di wilayah Kelurahan Sungai Keledang.

Daftar Pustaka

Buku-buku:

- Anwar, Syaiful, dan Supardi. 2002. *Dasar-dasar Prilaku Organisasi*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: RinekaCipta.
- AW, Suranto, 2005, *Komunikasi Perkantoran; Prinsip Komunikasi Untuk Meningkatkan Kinerja Perkantoran*, Depok, Yogyakarta. Media Wacana
- Halim Abdul, Tjahjono Achmad, & Husein Muh. Fakhrie, 2003. *Sistem Pengendalian Manajemen*, UPP AMP YKPN.
- Handoko, T. Hani, 1999. *Manajemen*. Edisi Kedua. BPFE. Yogyakarta Hasibuan, Malayu SP, 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Kriyantono. 2010. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Kencana. Jakarta
- Manullang, M.2005. *Dasar-dasar Manajemen*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2002, *Motodelogi Penelitian kualitatif*. Rosda, Bandung
- 2004. *Metodelogi Penelitian kuantitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Milles, Mattew B. & A. Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. UI-Press, Jakarta
- Salam, Darma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintah Indonesia*. Jakarta. Djembatan
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta. Bandung
- Sule, Trisnawati Ernie dan Saefullah, Kurniawan. 2005. *Pengantar Manajemen*. Kencana. Jakarta.
- Suhendra, K. 2006, *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Alfabeta. Bandung
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Suryono, Agus.2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. UM Press Malang
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daaerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Penerbit Citra Utama. Jakarta
- 2010. *Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah*. Citra Utama. Jakarta Suryabrata.
2006. *Metodelogi Penelitian*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Siagian P. Sondang. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Rineka Cipta. Jakarta
- 2004. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Rineka Cipta, Jakarta
- 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Bumi Aksara. Satori, Djam'an & Aan Komariah. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Albeta.
- Tarigan, R. 2006, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta

Veithzal Rivai. 2006. *Credit Manajemen Handbook*. 2006. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Winardi. 2004. *Motivasi dan Pemasalahan dalam manajemen*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

Dokumen:

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai Suatu upaya Pemerataan Pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

No 18 Tahun 2002 Kota Samarinda Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.